

DPRD DKI Kembali Gelar Rapat Pembahasan Anggaran di Puncak

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta tengah membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2021. Sama seperti pembahasan anggaran sebelum-sebelumnya, anggota dewan memilih untuk menggelar rapat di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD DKI, Augustinus menyebut keputusan itu diambil untuk mencegah kerumunan dalam pembahasan anggaran lantaran pandemi Covid-19 masih merebak.

Ia memberi contoh saat rapat Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2020 yang dilakukan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. "Itu terlalu crowded. Pendamping-pendamping kepala SKPD itu tetap datang (ke rapat)," ujar Augustinus saat dihubungi wartawan pada Kamis (7/10).

Rapat dengan agenda pembahasan dan pendalaman rancangan KUPA-PPAS

Perubahan APBD 2021 itu berlangsung hari ini dan Jumat (8/10). Setelah rapat, kata Augustinus, Pemprov DKI harus menyusun terlebih dahulu masukan dan saran dari DPRD. Penandatanganan nota kesepahaman alias MoU pun akan berlangsung pekan depan.

"Nanti tanggal 13-nya kita lakukan MoU eksekutif dengan legislatif," tutur Augustinus.

Seperti diketahui, sejak pandemi, DPRD DKI beberapa kali menggelar rapat di Bogor dengan alasan mencegah kerumunan dan potensi penularan Covid-19. Misalnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI yang membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) pada Juni lalu di Bogor.

Tahun lalu DPRD DKI pernah menggelar rapat di Resort Grand Cempaka ihwal anggaran 2020 dan 2021. Alasannya juga karena tingginya kasus Covid-19 di Jakarta. ● yan

Penerapan Aplikasi PeduliLindungi Diperluas

KOTABEKASI (IM) - Penerapan aplikasi PeduliLindungi diperluas pada gedung-gedung kantor Pemerintahan Kota Bekasi, menjangkau sampai dengan tempat pelayanan publik.

Sampai dengan saat ini Gedung Pemerintahan Kota Bekasi yang sudah memiliki QR Code PeduliLindungi, di antaranya : GOR Patriot Candrabhaga, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, MPP BTC, terminal Kayuringin, kantor kecamatan dan kantor kelurahan serta puskesmas.

"Diterapkan di kantor pemerintahan hingga kelurahan serta tempat pelayanan publik," jelas Kepala Bagian Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah dalam siaran persnya, Kamis (7/10).

Pemerintah Kota Bekasi juga telah menerbitkan surat edaran nomor 440/1395 Set Covid 19 dari Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid 19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi, Dr Rahmat Effendi.

"Sesuai Surat Edaran

yang sudah disosialisasikan ke publik, kami Dinas Pendidikan telah melaksanakannya. Untuk seluruh masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan. Di pintu masuk wajib barcode," kata Sajekti.

Dalam barcode PeduliLindungi, membuktikan dan menandakan bahwa masyarakat sudah divaksin covid 19. Pemerintah Kota Bekasi secara gencar telah menyosialisasikan ke publik, untuk seluruh masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan, pada pintu masuk wajib barcode.

Selain itu Surat edaran tentang Kewajiban Vaksinasi Covid-19 dalam Pengurusan Pelayanan Publik ini, ditandatangani Wali Kota Bekasi Dr Rahmat Effendi selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19, tanggal 9 September 2021.

Disetujui dalam surat edaran itu, sesuai program vaksinasi yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunitas masyarakat terus berlanjut untuk memacu masyarakat agar melaksanakan vaksin covid-19. Hal itu juga sejalan dengan perpanjangan PPKM level 3 di Kota Bekasi. ● mdl

Kodim 0510 Tigaraksa Kerjasama Eka Hospital Gelar Vaksin Gratis

VAKSINASI GRATIS

Kerjasama Kodim 0510/Tigaraksa dan Eka Hospital

Vaksin Sinovac
dosis 1 dan 2



Eka Hospital BSD:
24 Sept; 28 Sept - 09 Okt
pk.09.00-14.00 (Minggu libur)

Intro Jazz Bistro & Cafe:
28 Sept - 5 Okt
pk.09.00-14.00 (Minggu libur)
(PIC: 021 222 303 94)

Swastika Vaksin:
• Unit 122 health bina fotocopy (KK)
• Membawa FOTOCOPI dari asli KTP/IK
• WNA membawa FOTOCOPI dari asli KITAS/KITAP

TIGARAKSA (IM)

Upaya menambah jumlah warga Kabupaten Tangerang yang divaksin Kodim 0510, Tigaraksa, bekerjasama dengan Eka Hospital menggelar vaksin satu dan dua secara gratis di Eka Hospital BSD Kabupaten Tangerang.

Untuk diketahui warga masyarakat Kabupaten Tangerang berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa saat ini dan yang sudah divaksin baru sekitar 50 persen yaitu sekitar 1,2 juta jiwa.

Dandim 0510 Tigaraksa, Letkol Inf Bangun I E Siregar, Kamis (7/10) mengatakan, serbuan vaksin di Eka Hospital sudah dilakukan mulai tanggal 24 September 2021 lalu sampai 9 Oktober 2021 mendatang.

"Selain bekerjasama dengan Eka Hospital, Kodim 0510 Tigaraksa juga membuka geray-geray vaksin di Koramil Koramil jajaran Kodim 0510 Tigaraksa dengan tujuan untuk mencapai jumlah 50 persen lagi yaitu sekitar 1,3 juta jiwa lagi," kata Dandim.

Dandim menambahkan, untuk wilayah Kabupaten Tangerang dalam jumlah warga yang divaksin tertinggal cukup jauh dari Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangsel yang sudah 80% terdivaksin warganya. "Untuk mencapai itu Kodim 0510 Tigaraksa baik melalui gerai-gerai atau pun kerjasama dengan pihak-pihak swasta dilakukan demi tercapainya jumlah warga yang divaksin. Dengan begitu penyebaran virus Covid 19 dapat dihambat," kata Dandim. ● tom

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PEMBEKALAN ANTI KORUPSI PENYELENGGARA NEGARA

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan usai mengikuti program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/10). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di Kementerian/lembaga.

Indef: Tinjau Ulang Kebijakan DKI Soal Peredaran Produk IHT

Kebijakan yang tidak hati-hati seperti Sergub DKI No. 8/2021 diyakini bisa mengancam mata pencaharian jutaan tenaga kerja di dalam mata rantai IHT dan ritel. Padahal sektor ini tengah menghadapi imbas dari berkurangnya jam operasional baik di tempat usaha maupun pabrik.

JAKARTA (IM) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait peredaran produk industri hasil tembakau (IHT) perlu ditinjau ulang sebab memberikan dampak negatif berganda.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esa Suryaningrum mengatakan Sergub Gubernur DKI Jakarta No. 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok diyakini memberikan efek domino dan diskriminatif.

"Tidak hanya berdampak bagi pekerja sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan peritel, tetapi juga menambah beban ekonomi masyarakat yang bergantung pada industri

tembakau di tengah pandemi Covid-19," katanya, Kamis (7/10).

Seruan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan tersebut, lanjutnya, dinilai semakin menekan dan memperburuk tantangan yang sudah dirasakan seluruh rantai industri ritel di hilir. Selain itu akan berdampak kepada jutaan petani tembakau dan cengkih di hulu.

"Langkah Pemrov DKI tersebut seharusnya ditinjau secara matang, mempertimbangkan efek domino yang menjadi dampaknya," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Dikatakannya, seruan yang menargetkan peredaran produk IHT di tengah tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan melemahnya permintaan pasar seperti ini

akan memunculkan dampak sistemik. Menurut Esa, seharusnya kebijakan terkait industri yang signifikan seperti sektor IHT dilakukan secara hati-hati dan selaras.

Kebijakan yang tidak hati-hati seperti Sergub DKI No. 8/2021 diyakini bisa mengancam mata pencaharian jutaan tenaga kerja di dalam mata rantai IHT dan ritel. Padahal sektor ini tengah menghadapi imbas dari berkurangnya jam operasional baik di tempat usaha maupun pabrik.

"Jadi, pemerintah perlu memikirkan dampak ekonominya. Dampaknya tidak hanya kepada industrinya saja, tapi juga kepada banyak pihak yang bergantung pada industri rokok, termasuk petani tembakau," ujar Esa.

Menurut dia, kalau pemerintah ingin mengurangi jumlah perokok, cara yang paling efektif adalah dengan komunikasi publik, bukan dengan menurunkan balih rokok.

Senada dengan itu, Ketua Departemen Minimarket Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo), Gunawan Baskoro mengatakan seruan gubernur DKI akan makin menekan kinerja ritel secara keseluruhan. Dikatakannya, ritel di segmen toko swalayan, kelontong,

supermarket, dan department store sudah banyak yang berguguran sepanjang pandemi, tidak kurang dari 1.500 gerai yang sudah tutup permanen sepanjang dua tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), So-

eseno mengungkapkan kehadiran Sergub DKI No. 8/2021 seolah kebijakan pemerintah daerah memusuh industri tembakau. Menurut dia, saat ini tercatat ada sekitar 300 peraturan daerah (perda) senafas yang seakan membidik produk IHT sebagai sasaran. ● yan

Depok Masih Bertahan di Zona Kuning Penyebaran Covid-19

DEPOK (IM) - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok menyampaikan perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Depok yakni status risiko Kota Depok per 3 Oktober 2021 dinyatakan masih bertahan di zona kuning atau risiko rendah penyebaran Covid-19.

"Pada data tersebut tidak terjadi perubahan skor di Kota Depok, dari 2,67 pada 26 September hingga 3 Oktober 2021 masih bertahan skor tersebut. Skor tersebut didapat berdasarkan indikator Kesehatan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujar Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana dalam siaran

pers yang diterima, Kamis (7/10).

Selain Kota Depok juga terdapat kota dan kabupaten lain yang berada di zona kuning atau risiko rendah. Di antaranya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

"Pemkot Depok terus meminta kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam segala aktivitas. Dengan demikian angka penularan Covid-19 dapat cegah. Serta kondisi Kota Depok dapat kembali masuk ke zona hijau atau tidak memiliki kasus positif Covid-19," tutur Dadang. ● yan

Gardu Listrik Kebon Jeruk Terbakar, Ribuan Rumah Terdampak

JAKARTA (IM) - Gardu Listrik di Jalan Gili Sampeng, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk terbakar, Kamis (7/10) sekitar pukul 07.20 WIB. Akibat dari insiden tersebut, ribuan rumah di Kebon Jeruk mengalami padam listrik.

"Sekitar 3.000-an ke atas kalo di rumah itu menggunakan 1.300 watt ya," ujar Kaprotes Kebon Jeruk, Kumpul Slamet Riyadi, Kamis (7/10).

Namun saat ini, kata Slamet, pihak PLN sedang menangani padam listrik itu. Dengan adanya tindakan cepat dari PLN itu aliran listrik di kawasan terdampak kembali normal. Kata dia, di tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran itu ada tiga trafo. Tetapi beruntung hanya satu yang terbakar, yakni trafo dua. Kemudian, tapi merambat ke perkantoran PLN yang be-

rada di lokasi.

"Ada asap yang membubung, sehingga kesigapan dari para karyawan pada keluar. Alhamdulillah beberapa jam berikutnya dapat dipadamkan dan tidak ada korban jiwa," tutur Slamet.

Peristiwa kebakaran gardu listrik itu dilaporkan ke Damkar DKI Jakarta sekitar pukul 07.25 WIB. Penyebab kebakaran diduga karena arus pendek gardu listrik. Insiden itu kemudian berdampak pemadaman listrik di daerah Kebayoran Lama, Kemanggisan, Meruya, Kedoya, Tanjung Duren, Kebon Jeruk, dan Daan Mogot. Selanjutnya, untuk menormalkan aliran listrik ke pelanggannya, PLN memindahkan aliran ke sumber listrik lain. Hingga saat ini, sebanyak 70 persen wilayah yang terdampak disebut telah normal kembali. ● yan

Anies Targetkan Kampung Susun Cakung Rampung Maret 2022

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan Ibu Kota bukan hanya ditempati orang yang memiliki uang saja. Hal itu disampaikan Anies saat memberikan sambutan terkait pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di RW 05 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (7/10).

"Kota ini milik semua, bukan hanya yang beruang (memiliki uang). Siapa saja warga Jakarta berhak punya tempat tinggal yang layak. Harus," ujar Anies. Namun, lanjut Anies, semuanya itu harus dilakukan dengan cara yang benar.

"Cara yang benar ini memerlukan proses, karena itu butuh kesabaran menjalani ini,"

kata Anies. Anies saat meresmikan pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Kamis kemarin.

Anies mengatakan, kampung susun ini akan ditempati 75 keluarga dari Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang digusur pada 2016 silam. "Sebuah janji, alhamdulillah hari ini mulai kita lunasi dan tunaikan sebaik-baiknya. Kita semua bersyukur, persis lima tahun satu bulan dari peristiwa akhir September 2016," kata Anies.

Selesai Maret 2022

Anies Baswedan menargetkan pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung rampung pada Maret 2022. "Mudah-mudahan bulan Maret akan tuntas, lalu mereka (warga Bukit Duri) akan ting-

gal di sini untuk waktu yang permanen," kata Anies

Anies berharap, masa depan warga Bukit Duri semakin baik dengan dibangunnya Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. "Kita ingin anak-anak yang tinggal di tempat ini, bisa bercerita bahwa ada periode lima tahun dalam perjalanan hidupnya terasa seperti pengungsi di negeri sendiri," ujar Anies. Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Jakarta Timur Eka Darmawan menuturkan, rusun atau kampung susun itu dibangun di tanah seluas 4.000 meter persegi, terletak di lahan HPL Nomor 4 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Lahan itu sebelumnya ditempati oleh beberapa pedagang dan petani kangkung. ● yan

Pj. Bupati Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Marketing Digital

CIKARANG TIMUR (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi untuk memanfaatkan pemasaran digital di era perkembangan teknologi.

"Pemasaran digital menjadi alternatif yang paling tepat untuk UMKM agar bisa bertumbuh meski di masa sulit seperti situasi pandemi saat ini, asalkan pelaku UMKM mau memanfaatkannya," ujar Pj. Bupati saat membuka kegiatan Festival Kuliner yang digelar di Gedung Graha Pariwisata, Cikarang Timur, Rabu (6/10).

Dani Ramdan menambahkan, pelaku usaha di bidang pariwisata, khususnya sektor kuliner, harus bisa mengikuti kemajuan perkembangan teknologi terutama pada aspek promosi. "Dengan menggunakan teknologi, kita dapat semakin memperluas jaringan

dan pasar kita, sehingga produk kita lebih dikenal masyarakat secara luas. Kita bisa gunakan platform digital yang sudah ada secara maksimal," tuturnya dalam rilis Promopim Setdakab Bekasi, Rabu (6/10) malam.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa festival kuliner tersebut diselenggarakan untuk meninjau para pelaku usaha, agar terus menciptakan kreativitas menu atau produk yang menjadi ciri khas Kabupaten Bekasi yang semakin unik dan disukai oleh masyarakat.

Pj. Bupati Dani juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mewajibkan toko-toko, minimarket, dan supermarket untuk menggelar atau menjual produk UMKM Kabupaten Bekasi, sebagai upaya dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membangkitkan sektor UMKM.

"Kami juga akan instruksikan dan kerjasama dengan Ba-



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) saat membuka kegiatan Festival Kuliner di Gedung Graha Pariwisata, Cikarang Timur, Rabu (6/10).

gian Umum dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar produk UMKM ini menjadi menu wajib dalam setiap jamuan

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

festival kuliner yang mengusung tema Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit ini menghadirkan sebanyak 30 stand kuliner dengan berbagai jenis olahan makanan tradisional dan kue yang berasal dari Kabupaten Bekasi. "Untuk membangkitkan semangat UMKM, khususnya sektor kuliner, kita memberikan kesempatan para pelaku UMKM, untuk memunculkan ide-ide kreatifnya agar Kabupaten Bekasi mempunyai ciri khas," katanya.

Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari, yakni tanggal 6 hingga 8 Oktober 2021, dan terdapat pelatihan pemasaran secara online atau digital marketing oleh Blibli.com pada hari terakhir. "Saya harap acara ini dapat berjalan dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga segera terwujud pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat," tutup Encep. ● mdl